

Tahun Anggaran 2023

---

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH

---



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Padang Pariaman

---

[dppkb.padangpariamankab.go.id](http://dppkb.padangpariamankab.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



**HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE**  
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021- 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP 2023 ini merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pariaman, 22 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra.ELFI DELITA,M.Farm,Apt  
NIP. 196608021993032005

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	3
C. Sistematika Pelaporan.....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	6
B. Rencana Kinerja tahunan ( RKT ) tahun 2023... ..	8
C. Perjanjian Kenerja.....	9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KENERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	41
C. Penghargaan.....	47
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Langkah Kedepan .....	51

**P**

emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah yang baik, upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah berupa penyampaian Laporan Kinerja.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

### **1. Kelembagaan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jl. Zaini No. 07 Kuraitaji Pariaman, berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah , maka Badan Kependudukan dan Keluarga daerah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 57 tahun 2016, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dibentuk melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

---

Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pembinaan, pengawasan, dan penengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
  - b. Perumusan kebijakan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Pelaksanan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - h. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Ringkasan Personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mempunyai susunan personil sebagai Berikut :

**Tabel : 1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

No	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	0	SD	0	
2	II	0	SMP	0	
3	II	3	SLTA	3	
4	II	7	D-3	7	
5	III	0	SLTA	0	
6	III	0	D-3	0	
7	III	16	S.1	16	
8	III	1	S.2	1	
9	IV	3	S.1	3	
10	IV	4	S.2	4	
Jumlah		34		34	

**B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Berdasarkan tugas pokok yang diemban, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka menyelenggaraan urusan wajib pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis diantaranya :

1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK, pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.

- 
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB antara lain; angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, Masih rendahnya keinginan bagi Pasangan Usia Subur untuk ber KB padahal sdh tidak ingin memiliki anak lagi, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, Masih rendahnya capaian peserta KB aktif pengguna metode kontrasepsi jangka panjang ( MKJP ), penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat, rendahnya kesertaan ber-KB pria.
  3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain; Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, masih banyaknya perkawinan usia muda, terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi, Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah, cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

### **C. Sistematika Pelaporan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi, Ringkasan Personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dan Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED) dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

---

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun;
- 8) Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**D**inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 merupakan tahun ke dua dari periode Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Target-target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana tahun 2023 :

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Selanjutnya Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026 maka visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

## **“ PADANG PARIAMAN BERJAYA “**

Jadi visi tersebut merupakan pandangan kedepan yang bersifat menantang dan disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, sehingga diharapkan visi lebih realistis dalam arti dapat dicapai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

### **2. MISI**

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi 5 dan 6 , Misi 5 Yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Aspiratif Dan Trasparan,** dengan Tujuan Biokrasi yang bersih dan akuntabel dan sasaran Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan DPPKB,** sedangkan misi ke 6 Yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”,** dengan tujuan RPJMD nya adalah **“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal”** sedangkan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah **” Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”**. “ dengan indikator tujuan **“laju pertumbuhan penduduk”**.

Sedangkan sasaran strategisnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesertaan Ber- KB (CPR)
- b. Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan (TFR)
- c. Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) (ASFR)

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2023 (RPJMD 2021-2026)**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.Meningkatnya kesertaan Ber-KB ( CPR )	Persentase Kepesertaan KB aktif ( CPR )

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat			2. Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan (TFR)	Persentase Total Fertility Rate (TFR)
			3. Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Aspiratif Dan Transparan	Biokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai LPPD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan DPPKB	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB Dari Inspektorat
		Opini WTP		

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pengendalian Pendudukan dan keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum dirubah	Target setelah dirubah
		INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatkan Kesertaan Ber – KB	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	66,00%	-
2.	Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan (TFR)	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	2,31%	2,1
3.	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per 1000 Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn)	12	3,9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum dirubah	Target setelah dirubah
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan DPPKB	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB Dari Inspektorat	A	-

Penyebab perubahan target adalah berdasarkan kepada realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 . Target pada indikator Presentase Total Fertility Rate (TFR) mengalami perubahan disesuaikan dengan realisasi sebelumnya yaitu dari 2.31 % menjadi 2,1% dan Target pada indikator Per1000 Angka melahirkan usia remaja (15-19 Thn) dari 12 Per1000 menjadi 2,3 Per1000.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana telah di tetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, berikut di tampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan	Persentase Total Fertility Rate	2.1 %
2.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB (CPR)	Persentase Peserta KB Aktif	66.00 %

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
3.	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (ASFR) (15-19 Tahun)	Per 1.000 Usia Remaja Umur 15-19 Tahun Melahirkan	2.3 per 1000
4.	Meningkatnya akutabilitas dan Kinerja Pelayanan DPPKB	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip DPPKB dari Inspektorat	A

**D**inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2023. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpestasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan Pengukuran dengan Scala Ordinal yaitu :

Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
'> 100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤100	Berhasil
'<80 s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
'< 70 s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Utama yang menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah sebagai berikut :



## A. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Penduduk” merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman yakni “ Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah “Laju Pertumbuhan Penduduk”. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan banyak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menekan besarnya angka laju pertumbuhan penduduk tersebut namun dirasa masih belum maksimal, diantaranya adalah mensosialisasikan dua anak lebih baik, pembagian alat kontrasepsi gratis, serta memberikan penyuluhan tentang penggunaan KB.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah Angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai presentase dari penduduk. Guna dari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dalam 2 periode waktu. Pertumbuhan Penduduk juga adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.

### a) Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

**Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70	1,7327	98,08	Berhasil

Adapun formulasi pengukuran realisasi kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Formulasi pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah penduduk Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yaitu 1.7327% sedangkan target yang ditetapkan adalah 1,70% dengan kategori **“Berhasil”**, Artinya Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan tetapi persentase penambahan penduduk tidak terlalu signifikan karena masih dalam kategori “Berhasil” dengan pencapaian sebesar 98,08%.

**b) Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Perbandingan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi LPP**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,39	1,7332	148,87	1,70	1,7327	98,08	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 hampir sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 1,7327% hanya mengalami sedikit penurunan yaitu 0,005. Artinya pencapaian 2023 lebih baik dari tahun 2022.

**c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi LPP Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,50	3,39	3,29	1,74	1.7332	1,7327

Realisasi Indikator Kinerja “Laju Pertumbuhan Penduduk” pada tahun 2021 yaitu 1,74% dengan target RPJMD sebesar 3,50%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 1,7332% dengan target RPJMD sebesar 3,39%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 1,7327% dengan target RPJMD 3,29%.

#### d) Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2023

Grafik 3.1



Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dimana realisasi nasional tahun 2023 adalah 1,13 dan realisasi Provinsi sebesar 1.08. Sedangkan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1,7327 dengan capaian 98,08 %.

#### e) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk bukan hanya tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, perangkat daerah Serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Laju Pertumbuhan Penduduk bisa diturunkan karena salah satunya adanya upaya pengendalian penduduk, upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan kepesertaan KB aktif, menurunkan angka melahirkan diusia remaja (15-19Tahun), menurunkan total Fertility Rate (TFR) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepesertaan KB
2. Menurunkan Angka Melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun
3. Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan /Total Fertility Rate (TFR)

---

**f) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.956.014.700,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 7.589.031.872,- atau sekitar 95,38% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,62% .

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada data dibawah ini :

1. Program pengendalian penduduk pada tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp.256.161.000 dan realisasinya sebesar Rp. 205.115.731 dengan persentase 80,1 %. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 385.100.000 dan realisasinya sebesar Rp. 353.013.650 dengan persentase 91,67 %.
2. Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp.4.430.574.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.586.286.589 dengan persentase 77,4%. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 5.484.984.901 dan realisasinya sebesar Rp. 5.158.799.472 dengan persentase 94,05 %.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 1.964.580.000 dan realisasinya sebesar Rp. 715.460.848 dengan persentase 41% Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 2.085.559.900 dan realisasinya sebesar Rp. 2.077.218.750 dengan persentase 99,60 %.

**g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan kepesertaan ber-KB, menurunkan angka kelahiran total dan menurunkan angka melahirkan di usia remaja 15-19 Tahun adalah sebesar Rp.7.589.031.872. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar,

---

Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD, DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dan DAK Fisik.

Dalam mencapai target indikator kinerja utama LPP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.7.956.014.700,- dengan 3 program 5 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.6.651.315.000 dengan 3 program 5 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.4.506.863.168. Pada Tahun 2023 adanya kenaikan anggaran disebabkan oleh bertambahnya Dana BOKB sebesar Rp.4.911.371.000 dan DAK Fisik sebesar Rp.1.069.021.000.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

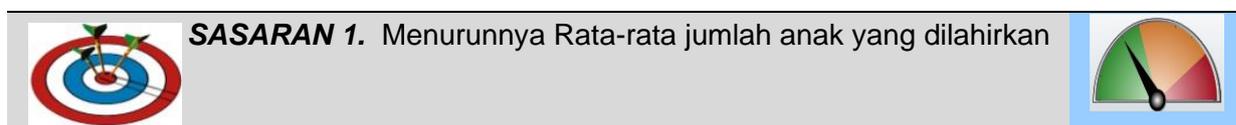
Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp.7.956.014.700,- dengan realisasi sebesar Rp.7.589.031.872 Dengan persentase sebesar 95,35 %. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

#### **D. Alternatif Solusi Kedepan Untuk Pencapaian IKU**

1. Meningkatkan penyuluhan KB secara merata  
Salah satu cara yang telah terbukti efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk ialah dengan menggalakkan program keluarga berencana atau KB. Keluarga Berencana adalah program yang dibuat pemerintah untuk rakyat Indonesia dengan membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga dianjurkan untuk cukup memiliki 2 orang anak saja.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana  
Pelaksanaan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan melalui kerjasama yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Padang Pariaman dengan fasilitas kesehatan yang terdiri dari pemerintah, swasta, Dokter praktek serta Bidan praktek mandiri dengan melakukan pelayanan KB secara rutin.
3. Memperbanyak sosialisasi kepada remaja tentang bahaya pernikahan usia dini melalui kelompok PIK-R

Tujuan diadakannya dan dibentuknya PIK R untuk mengetahui strategi dan peran PIK R yang berkaitan dengan kesehatan remaja. Nantinya kelompok ini yang akan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang bahayanya pernikahan usia dini untuk pengupayakan pencegahan tingginya angka pernikahan dini. Sehingga dengan memperbanyak sosialisasi ini akan menurunkan angka melahirkan usia remaja dan dapat mencegah pernikahan dini sehingga dengan berkurangnya kelahiran dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

Berikut ini adalah capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk tahun 2023 dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023, capaian kinerja tahun 2022 serta RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :



Dalam rangka menurunkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dimana yang menjadi indikatornya adalah Persentase Total Fertility Rate (TFR). Untuk mencapai sasaran tersebut telah berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2023. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai kegiatan, sebagai ukuran keberhasilan indikator yang ditetapkan berupa menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Analisa capaian indikator Persentase Total Fertility Rate (TFR) adalah sebagai berikut :

### 1. Capaian Kinerja Indikator Presentase Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2023

Tabel : 3.4  
Capaian Kinerja indikator Presentase Total Fertility Rate (TFR)  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	1,89	110	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka capaian indikator persentase Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Padang Pariaman bisa lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,89 %

karena semakin menurun angka TFR berarti semakin berhasil upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menekan angka kelahiran. Dari target yang ditetapkan, capaian kinerja indikator persentase Total Fertility Rate ini bisa diinterpretasi dengan kategori Sangat Berhasil ( 110% ).

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD, Implant, pil, kondom, suntik dan telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB, bertambahnya PUS yang ber-KB, pembinaan pada kelompok remaja serta pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

## 2. Capaian Kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

Tabel : 3.5  
Capaian Kinerja indikator presentase Total Fertility Rate Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023			Interpest asi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	1,93	2,1	1,89	110	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate (TFR) tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 1,89 sedangkan tahun 2022 sebesar 1,93. Artinya semakin menurun semakin meningkat capaian kinerjanya.

### 3. Capaian Kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2023 dibandingkan dengan target Jangka Menengah

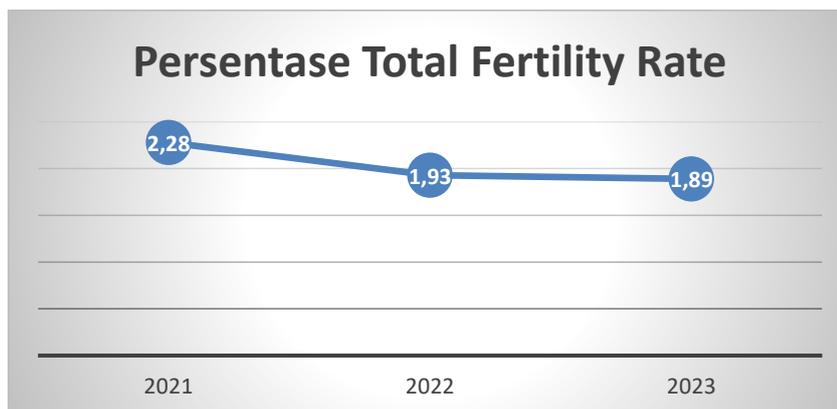
Tabel : 3.6  
Capaian Kinerja indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2023 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah		Realisasi 2023	Interpestasi
				2021	2022	2023	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	6	12	18	19	
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>								
1.	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,38	2,34	2,1	2,28	1,93	1,89	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi penurunan capaian TFR dari tahun ke tahun yaitu tahun ,artinya adanya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun, gambar pencapaian indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2

Capaian indikator Presentase Total Fertility Rate Tahun 2021-2023



### 4. Capaian Kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2023 dibandingkan dengan Target Nasional

Tabel : 3.7  
Capaian Kinerja indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Nasional	Realisasi 2023	Interpesta si
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,19%	1,89%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih rendah dari target nasional yaitu 1,89% dan target nasional 2,19 %.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Ketersediaan alat-alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, adanya peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), adanya dukungan Petugas Lapangan KB, Meningkatnya akses layanan kontrasepsi, Adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekali tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada masyarakat
2. Kurangnya dukungan Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah:

1. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program melalui kegiatan peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
3. Perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

---

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan dengan cara meningkatkan kepesertaan ber-KB, menurunkan angka kelahiran total dan menurunkan angka melahirkan di usia remaja 15-19 Tahun adalah sebesar Rp.7.589.031.872. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD, DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dan DAK Fisik.

Dalam mencapai target indikator menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.7.956.014.700,- dengan 3 program 5 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.6.651.315.000 dengan 3 program 5 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.4.506.863.168. Pada Tahun 2023 adanya kenaikan anggaran disebabkan oleh bertambahnya Dana BOKB sebesar Rp.4.911.371.000 dan DAK Fisik sebesar Rp.1.069.021.000.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp.7.956.014.700,- dengan realisasi sebesar Rp.7.589.031.872 Dengan persentase sebesar 95,35 %. Sementara Capaian Kinerja yang dapat diraih alah sebesar 110%. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

## **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan pada indikator menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan adalah program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kelahiran pada Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dengan jumlah anggaran sebesar Rp Rp. 25.700.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.

---

20.684.150,- atau 80,48%. dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp Rp. 359.400.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 332.329.500,- atau 92,48%.

- b. Kemudian Program Pembinaan Keluarga Berencana terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yaitu Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dengan jumlah anggaran sebesar 2.081.758.000 dengan realisasi 1.926.370.675 atau 92.54 %, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB atau PLKB) dengan jumlah anggaran sebesar 379.740.000 dengan realisasi 372.113.300 atau 97.99 %, Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar 2.214.586.901 dengan realisasi 2.093.538.087 atau 94.53 % dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan jumlah anggaran 808.900.000 dari jumlah tersebut direalisasikan sebesar 766.777.410 dengan presentase 94,79 %.
- c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan anggaran program ini sebesar 2.085.559,000 dan realisasinya sebesar Rp. 2.077.218.750 dengan persentase 99.60 %.

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada data dibawah ini :

1. Program pengendalian penduduk pada tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp.256.161.000 dan realisasinya sebesar Rp. 205.115.731 dengan persentase 80,1 %. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 359.400.000 dan realisasinya sebesar Rp. 332.329.500 dengan persentase 92,48%.
2. Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp.4.430.574.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.586.286.589 dengan persentase 77,4%. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 5.484.984.901 dan realisasinya sebesar Rp. 5.158.799.472 dengan persentase 94,05 %.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 1.964.580.000 dan realisasinya sebesar Rp. 715.460.848 dengan persentase 41% Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 2.085.559.900 dan realisasinya sebesar Rp. 2.077.218.750 dengan persentase 99.60 %.



## SASARAN 2.

Meningkatnya Kesertaan Ber-KB(CPR)



Dalam rangka meningkatkan kepesertaan ber-KB, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2023. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa indikator kepesertaan ber-KB aktif (CPR) di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, analisa capaian indikator kepesertaan ber-KB aktif (CPR) sebagai berikut :

### 1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel : 3.1  
Capaian Kinerja indikator kepesertaan ber- KB aktif  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CPR)	Persentase Peserta KB Aktif (CPR)	%	66,00	65,89	99,83	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator persentase Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR) Kabupaten Padang Pariaman hampir mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 65,89% dari target yang ditetapkan (65,89%), dengan kategori Berhasil ( 99,83 % ).

Hal ini disebabkan karena adanya akseptor KB yang sudah mandiri seperti penggunaan alat kontrasepsi pil, kondom, suntik, Adanya KIE Kepada Masyarakat, telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB PUS muda.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Tabel : 3.2.  
Capaian Kinerja indikator kepesertaan ber- KB aktif tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1.	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CPR)	Persentase Peserta KB Aktif ( CPR )	%	65,25	66,00	65,89	99,83	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 65,89%, sedangkan tahun 2022 sebesar 65,25%. artinya dengan interpretasi capaian berhasil ( 99,83 ).

Hal ini disebabkan adanya Peningkatan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2023 menjadi 11.198 dari tahun 2022 sebanyak 10.860.

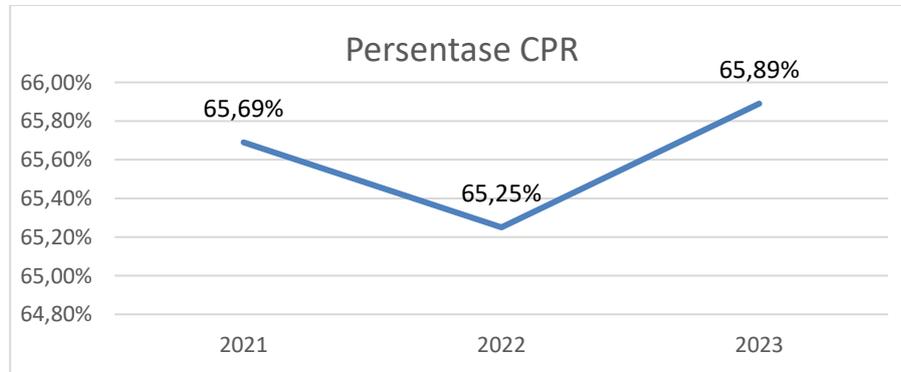
## 3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel : 3.3  
Capaian Kinerja indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah		Realisasi 2023	Interpretasi
				2021	2022	2023	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>								
1	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CPR)	Persentase Peserta KB Aktif ( CPR )	%	65,00	65,75	66,00	65,69	65,25	65,89	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 65,25 % menjadi 65,89 %, gambar pencapaian indikator Persentase Peserta KB aktif ( CPR ) tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 1**  
**Capaian indikator Kepesertaan KB Aktif Tahun 2021-2023**



Dari grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan kepesertaan ber-KB di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu menjadi 65,89%.

Adanya penyebab peningkatan dari tahun 2022-2023 itu dikarenakan karena adanya penurunan unmetneed (PUS yang ingin Ber-KB tapi tidak terpenuhi) yaitu pada tahun 2022 sebesar 16,05% dan pada tahun 2023 menjadi 15,72% .

**4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel : 3.4.

Capaian Kinerja indikator Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR) tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Nasional	Realisasi 2023	Interpestasi
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1.	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CPR)	Persentase Peserta KB Aktif ( CPR )	%	62,92%	65,89%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih tinggi dari target nasional yaitu 65,89 % dari target nasional 62,92 %.

---

## **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Faktor Keberhasilan Pencapaian CPR adalah karena Adanya KIE Kepada Masyarakat tentang KB, Adanya dukungan anggaran BOKB, dukungan sumber daya manusia (petugas lapangan KB, kader KB), ketersediaan alat-alat kontrasepsi di faskes, Meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB dan adanya dukungan dari lintas sektoral seperti kegiatan GERAK IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES dan lokakarya mini di kampung KB.

Keberhasilan ini juga melibatkan dinas dan instansi terkait seperti:

- DINKES dan RSUD, terkait dengan pemberian pelayanan KB, penyediaan tenaga pelaksana KB, penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan KB;
- TNI (Kodim 0308), terkait dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaksanakan KB terutama metoda operasi pria (MOP);
- Organisasi Profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk keterlibatan memberikan pelayanan alat kontrasepsi kepada akseptor KB;
- Tim penggerak PKK Kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan dan Nagari, serta kader KB dalam bentuk menggerakkan masyarakat untuk aktif ber-KB.

Permasalahan / Hambatan:

- Akseptor yang membuka Alat Kontrasepsi agar bisa hamil karena ingin anak segera
- Kurangnya dukungan Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana
- Pasangan yang baru menikah lebih banyak yang menginginkan anak segera

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah:

- Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
- Perlu peningkatan kesadaran kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB, serta meningkatkan kerja sama yang lebih intensif bersama mitra terkait.

## **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung meningkatkan kepesertaan ber-KB, adalah sebesar Rp.5.158.799.472. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD, DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dan DAK Fisik.

Dalam mencapai target indikator meningkatkan kepesertaan ber-KB tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 5.484.984.901,- dengan 1 program 4 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 4.430.574.000 dengan 1 program 4 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 3.586.286.589.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 5.484.984.901,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.158.799.472 Dengan persentase sebesar 94,05 %. Sementara Capaian Kinerja yang dapat diraih alah sebesar 99,83%. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

## **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan sasaran kepesertaan Ber-KB ( CPR ) antara target dan realisasi adalah kurang sedikit dari target yang ditentukan yaitu sebesar 65,89 %, dengan interpestasi 99,83. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepesertaan ber-KB Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dianggarkan sebesar Rp.2.081.758.000 dan terealisasi Rp.1.926.370.675 atau sebesar (92,54%).
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dianggarkan sebesar Rp.379.740.000 dan terealisasi Rp.372.113.300 atau sebesar (97,99 %)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan sebesar Rp.2.214.586.901 dan terealisasi Rp.2.093.538.087 atau sebesar (94,53 %).
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dianggarkan sebesar Rp.808.900.000 dan terealisasi Rp.766.777.410 atau sebesar (94,79%).

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada data dibawah ini :

1. Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp.4.430.574.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.586.286.589 dengan persentase 77,4%.

Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 5.484.984.901 dan realisasinya sebesar Rp. 5.158.799.472 dengan persentase 94,05 %.

Pada tahun 2023 realisasi pencapaian pelayanan KB aktif sebanyak 43.702 dari target 21.274 dengan persentase capaian 205,42 %, sedangkan realisasi capaian per jenis kontrasepsi adalah sebagai berikut :

1	Pelayanan IUD	:	dari 1.161 target yang ditetapkan, tercapai 2.301 dengan persentase sebesar 198,19 %
2	Pelayanan MOW	:	dari 2.029 target yang ditetapkan tercapai 1.392 dengan persentase 68,60 %
3	Pelayanan MOP	:	dari 170 target yang ditetapkan tercapai 329 dengan persentase 193,52 %
4	Pelayanan KONDOM	:	dari 981 target yang ditetapkan tercapai 4.043 dengan persentase 412,13 %
5	Pelayanan IMPLANT	:	dari 2.171 target yang ditetapkan tercapai sebanyak 7.176 dengan persentase sebesar 330,54 %
6	Pelayanan SUNTIK	:	dari 7.913 target tercapai sebanyak 17.520 dengan persentase sebesar 221,41%
7	Pelayanan PIL	:	dari 2.447 target tercapai sebanyak 11.290 dengan persentase sebesar 461,38 %

**REKAPITULASI CAPAIAN PESERTA KB AKTIF  
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	MIX KONTRASEPSI							
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIK	PIL	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LUBUK ALUNG	266	113	60	457	1.390	2.674	692	5.652
2	NAN SABARIS	212	124	12	108	343	1.294	436	2.529
3	2x11 ENAM LINGKUNG	33	32	12	108	690	827	643	2.345
4	VII KOTO SUNGAI SARIK	510	167	43	239	343	968	1.002	3.272

5	V KOTO KAMPUNG DALAM	153	56	44	183	515	1.146	873	2.970
6	SUNGAI GERINGGING	124	133	27	97	590	1.045	660	2.676
7	SUNGAI LIMAU	72	46	17	214	196	983	1.034	2.562
8	IV KOTO AUR MALINTANG	95	136	18	503	517	507	770	2.546
9	BATANG ANAI	28	30	16	158	1.264	2.329	1.620	5.445
10	BATANG GASAN	200	55	9	120	217	507	500	1.608
11	V KOTO TIMUR	37	75	20	155	172	572	597	1.628
12	ULAKAN TAPAKIS	106	115	5	455	108	589	435	1.813
13	PATAMUAN	67	34	6	192	235	750	226	1.510
14	ENAM LINGKUNG	116	68	2	543	56	834	667	2.286
15	SINTOGA	71	67	7	275	144	663	297	1.524
16	2X11 KAYU TANAM	204	113	30	176	326	1.484	668	3.001
17	PADANG SAGO	7	28	1	60	70	348	170	684
<b>KABUPATEN</b>		2.301	1.392	329	4.043	7.176	17.520	11.290	44.051

Berbagai macam bentuk program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam upaya pencapaian terhadap Peserta KB aktif, yaitu meningkatkan Capaian tingkat pemakaian peserta KB aktif bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Padang Pariaman, adapun upaya

bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi MKJP.

### Pelayanan KB MKJP



Pelayanan KB MKJP Untuk Peningkatan penggunaan MKJP, Pada tahun 2023 ini jumlah peserta MKJP adalah sebanyak 11.198.

### Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor



Tujuan dari kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

### Pelayanan KB dalam rangka bulan bhakti IBI



#### **SASARAN 3.**

Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (ASFR)  
(15-19 Tahun)



Dalam rangka menurunkan angka melahirkan di usia remaja ( 5-19 Thn) (ASFR) yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dimana yang menjadi sasarannya disamping meningkatkan kesertaan ber-KB juga menurunnya angka melahirkan di usia remaja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2023. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai kegiatan, sebagai ukuran keberhasilan indikator yang ditetapkan berupa menurunnya angka melahirkan di usia remaja (15-19 Thn) (ASFR).

Kelompok remaja di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 baik di lingkungan institusi pemerintah (lingkungan sekolah) maupun di luar sekolah serta kelompok bina keluarga mempunyai kelompok remaja berjumlah 420 kelompok, yang terdiri dari 106 kelompok bina keluarga balita (BKB), 47 kelompok bina Keluarga remaja (BKR) , 97 kelompok bina keluarga lansia (BKL), 70 kelompok PIK-R, 72 kelompok UPPKA dan 15 kelompok PPKS, analisa capaian indikator Angka Melahirkan di Usia remaja sebagai berikut :

## 1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel : 3.5  
Capaian Kinerja indikator Per 1000 Angka Melahirkan di Usia Remaja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) ( ASFR )	Per 1000 Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Tahun) melahirkan	Per 1000	3,9	3,18	118,4	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator angka melahirkan di usia remaja (15-19 tahun)/ ASFR di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 3,18 per 1000 dari target yang ditetapkan yaitu 3,9 per 1000, artinya angka melahirkan diusia remaja lebih rendah dari target dengan nilai skor 179% artinya dapat di interprestasikan kategori sangat berhasil.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Tabel : 3.6  
Capaian Kinerja indikator per1000 usia remaja 15-19 Tahun melahirkan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) (ASFR)	Per1000 usia remaja 15-19 Tahun melahirkan	Per1000	2,34	3,9	3,18	118,4	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya lebih agak tinggi dari tahun 2023 yaitu 3,18, sedangkan tahun 2022 sebesar 2,34. Tetapi pencapaiannya di tahun 2023 di interprestasi berhasil karena masih di bawah target, yang

artinya indikator kinerja dikatakan berhasil karena semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel : 3.7  
Capaian Kinerja indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2023 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah		Realisasi 2023	Interpest asi
				2021	2022	2023	2021	2022		
1	2	3	4	5	6		12	2022	18	19
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>								
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per1000 Usia remaja 15-19 Tahun melahirkan	Per 1000	14	13	3,9	6,31	2,32	3,18	Tidak Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan sedikit peningkatan di tahun 2023 yaitu dari 6,31 menjadi 2,34 dan 3,18 gambar pencapaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2  
Capaian indikator Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn )  
Tahun 2021-2023



Dari grafik diatas menunjukkan adanya penurunan angka melahirkan di usia remaja di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 ke tahun 2022 Tetapi pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 3,18.

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel : 3.8  
Capaian Kinerja indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Nasional	Realisasi 2023	Interpestasi
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per1000 Usia remaja 15-19 Tahun melhirkkan	Per1000	20	3,18	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih rendah dari target nasional yaitu 3,18 per1000 dari target nasional.

#### 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena:

- a. Adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekal tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Adanya Kerjasama Lintas Sektor.
- c. Adanya Dukungan Pemerintah daerah.
- d. Adanya Dukungan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- e. Adanya peran orang tua asuh, bagi anak yang menderita Gizi buruk yang beresiko tinggi seperti kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Bupati Padang Pariaman, Wakil

---

Bupati Padang Pariaman dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Pariaman.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kontribusi dinas dan instansi terkait seperti :

- DISDUKCAPIL, terkait ketersediaan data penduduk menurut kelompok umur;
- Seluruh Kecamatan dan Nagari, terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- KEMENAG, terkait dengan jumlah data wanita perkawinan pertama.

Permasalahan/Hambatan :

- Adanya peningkatan jumlah anak yang melahirkan diusia remaja (15-19) Tahun pada tahun 2023 yaitu dari 48 menjadi 59 orang.
- Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- Akses informasi di media sosial yang sangat pesat yang dijadikan wadah hiburan yang bersifat negatif seperti pornografi.
- Masih banyak remaja dan orangtua yang belum memahami tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan bahaya melahirkan diusia dini.

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah:

- Merencanakan, Menganggarkan dan melaksanakan Program Kegiatan
- Memperbanyak sosialisasi kepada remaja tentang bahaya pernikahan usia dini dan memperbanyak kelompok PIK-R.

## **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR ) adalah sebesar Rp. 2.085.559,000,-. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD, Dan DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana).

Dalam mencapai target indikator meningkatkan kepesertaan ber-KB tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 2.085.559,000,- dengan 1 program 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 1.964.580,000,dengan 1 program 1 kegiatan dan 8 sub sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.715.460.848.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp2.085.559,000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.077.218.750 Dengan persentase sebesar 99,06 %. Sementara Capaian Kinerja yang dapat diraih alah sebesar 118,4%. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2023, ada beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 di Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman program yang mendukung indikator ini adalah program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program ini dianggarkan sebesar Rp. 2.085.559,000 dan terealisasi Rp. 2.077.218.750 atau sebesar (99,6 %). Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yang mendukung yaitu : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada data dibawah ini : Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 1.964.580,000 dan realisasinya sebesar Rp.715.460.848 dengan persentase 36,42%. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 2.085.559,000 dan realisasinya sebesar Rp. 2.077.218.750 dengan persentase 99,6 %.

Dibawah ini disajikan beberapa dokumen photo-photo kegiatan sebagai berikut:

### ➤ Pemilihan Duta GenRe Kab. Padang Pariaman

Grand Final Genre Kab. Padang Pariaman



Pemilihan Genre Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Duta GenRe yang terpilih akan menjadi role model dan mensosialisasikan pemahaman mengenai kesehatan remaja, kependudukan, delapan substansi generasi berencana, pentingnya pendewasaan usia kawin, bahaya menikah usia muda, kriteria Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) terutama para remaja agar terhindar kehamilan tidak diinginkan seperti seks bebas, napza dan HIV/AIDS dan juga duta GenRe ini dapat memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang bahayanya pernikahan diusia dini untuk pengupayakan pencegahan tingginya angka pernikahan dini.

- Pembinaan Terhadap Kelompok Bina Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Balita (BKB)



Bina Keluarga Remaja (BKR)



Bina Keluarga Lansia (BKL)



Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pola asuh, kesehatan keluarga, Kesehatan reproduksi remaja , pendidikan, hubungan interpersonal, dan peran gender.



#### **SASARAN 4.** Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan DPPKB



Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja ditetapkan dengan indikator kinerja berupa : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB dari Inspektorat.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.

#### **1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Interpretasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat terlihat Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 realisasinya mencapai 100% dengan  
*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024*

nilai A dan interpretasi Sangat Berhasil. Nilai SAKIP yg berhasil diperoleh adalah A dengan nilai absolut 80,35. Hal ini membuktikan kesuksesan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Sasaran Strategis ke 4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja dengan indikator sasaran Hasil penilaian evaluasi SAKIP.

## 2. Membandingkan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2022	Tahun 2023			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	100	Sangat Berhasil

Realisasi kinerja pada indikator kinerja sasaran Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 adalah A. Dan nilai pada tahun 2022 adalah A artinya mencapai target yang ditetapkan.

## 3. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2023 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah		Realisasi 2023	Interpretasi
				2021	2022	2023	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	6	12	18	19	
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>								
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	B	A	A	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat ini ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, dapat mencapai target yang ditetapkan, artinya dapat diinterpretasikan sangat berhasil.

---

#### 4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2023 Hasil Penilaian Sakip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan SAKIP Perangkat Daerah.

Selain itu keberhasilan juga disebabkan adanya dukungan anggaran dari program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

#### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.3.560.231.645. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam mencapai target indikator meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 3.688.520.281,- dengan 1 program 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 4.723.449.090 dengan 1 program 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 4.611.101.772.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 3.688.520.281,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.560.231.645 Dengan persentase sebesar 96,52 %. Sementara Capaian Kinerja yang dapat diraih adalah sebesar 100%. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan capaian indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2023, ada beberapa program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2023 di Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman program yang mendukung indikator ini adalah program penunjang urusan pemerintah daerah, program ini dianggarkan sebesar Rp. 3.688.520.281 dan terealisasi Rp. 3.560.231.645 atau sebesar (96,52 %). Program ini terdiri dari 6 Kegiatan yang mendukung yaitu : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada data dibawah ini :

1. Program program penunjang urusan pemerintah daerah Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 4.723.449.090 dan realisasinya sebesar Rp. 4.611.101.772 dengan persentase 97,62%. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 3.688.520.281 dan realisasinya sebesar Rp. 3.560.231.645 dengan persentase 96,52 %.

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, tidak hanya terbatas pada APBD tetapi juga sumber pendanaan lainnya.

Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
1)	Tujuan : Birokrasi yang bersih dan akuntabel				
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.688.520.281	3.560.232.685	97%	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.505.000	21.505.000	100%	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.760.000	4.760.000	100%	Jumlah Dokumen renstra Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.830.000	3.830.000	100%	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.915.000	12.915.000	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD ( Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD dan Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan yang disusun
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.373.837.176</b>	<b>3.274.349.860</b>	<b>97%</b>	<b>Persentase Dokumen Keuangan Disiapkan</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.253.517.176	3.157.879.860	97%	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan dalam 1 Tahun
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>120.320.000</b>	116.470.000	97%	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>109.907.105</b>	<b>95.554.225</b>	<b>87%</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000	8.498.700	100%	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan Kantor
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.407.105	87.055.525	86%	Jumlah rapat-rapatk Koordinasi Luar daerah dan dalam Daerah yang dilaksanakan
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.833.500</b>	<b>153.508.600</b>	<b>91%</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.668.500	55.609.530	100%	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.175.000	47.909.070	77%	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.790.000	7.790.000	100%	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.200.000	42.200.000	100%	Jumlah Jasa Tenaga Honorer yang disediakan
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.437.500</b>	<b>15.315.000</b>	<b>99%</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	15.437.500	15.315.000	99%	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
<b>Tujuan : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>					
2)	<b>Sasaran : Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>				
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>385.100.000</b>	<b>353.013.650</b>	<b>92%</b>	<b>Persentase Total Fertility Rate (TFR)</b>
1	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>25.700.000</b>	<b>20.684.150</b>	<b>80%</b>	<b>Persentase dokumen kebijakan yang disusun</b>
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	10.840.000	10.769.150	99%	Jumlah kelompok PIK-R yang melayani informasi konseling remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	14.860.000	9.915.000	67%	Jumlah peserta mengikuti Rakorda DPPKB
2	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>359.400.000</b>	<b>332.329.500</b>	<b>92%</b>	<b>persentase dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang disusun</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	58.247.500	91%	Jumlah Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
	Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga	94.200.000	94.150.000	100%	Frekuensi Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	201.000.000	179.932.000	90%	Jumlah data kependudukan,KB, dan Pembangunan Keluarga yang dievaluasi tiap bulan yang disediakan
3)	<b>Tujuan : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>				
	<b>Sasaran : Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>				
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>5.484.984.901</b>	<b>5.158.799.472</b>	<b>94%</b>	<b>Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>2.081.758.000</b>	<b>1.926.370.675</b>	<b>93%</b>	<b>Presentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal</b>
	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	127.068.000	104.710.550	82%	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kab/Kota
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11.830.000	11.376.250	96%	Jumlah Pertemuan Penyuluh KB yang dilaksanakan
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	410.800.000	365.785.935	89%	Jumlah media promosi luar ruang yang disediakan
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	337.110.000	302.448.140	90%	Frekuensi Pelaksanaan Mini Lokakarya Kecamatan
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1.043.950.000	1.005.911.600	96%	Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpenuhinya biaya operasional

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	Pengendalian Program KKBPK	151.000.000	136.138.200	90%	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional
<b>2</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>379.740.000</b>	<b>372.113.300</b>	<b>98%</b>	<b>Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	149.000.000	146.324.800	98%	Jumlah orang petugas pembina KB Desa (PPKBD) yang dibina
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	230.740.000	225.788.500	98%	Jumlah orang Temu Kader IMP KB Tk. Kab, Tk. Propinsi dan Tk. Nasional
<b>3</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.214.586.901</b>	<b>2.093.538.087</b>	<b>95%</b>	<b>Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB</b>
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.714.901	34.500.000	99%	Menurunkan unmeedned
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	628.921.000	623.460.500	99%	Jumlah Akseptor Pelayanan Implan
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.386.021.000	1.277.128.087	92%	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.930.000	49.714.050	100%	Jumlah Petugas Faskes mendapatkan sosialisasi faskes terstandar (2 Tahapan)

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	60.000.000	54.843.450	91%	Peningkatan Kapasitas Petugas tenaga lini lapangan
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.000.000	29.960.000	100%	Jumlah pelayanan KB MKJP Non Kontak bagi PUS ( safari KB di Kecamatan)
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	25.000.000	23.932.000	96%	Jumlah Orang yang mengikuti penyuluhan tentang KB Pria
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>808.900.000</b>	<b>766.777.410</b>	<b>95%</b>	<b>Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb</b>
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	58.400.000	58.266.750	100%	Jumlah kegiatan gerakan IBI KB KES, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	49.500.000	48.964.350	99%	Frekuensi Penguatan Lintas Sektor Program Kampung KB
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	55.000.000	54.387.810	99%	Jumlah Sergab Kakab dilaksanakan
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	646.000.000	605.158.500	94%	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Pokja kampung KB
<b>4)</b>	<b>Tujuan : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>				
	<b>Sasaran : Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>				
<b>D</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.085.559.900</b>	<b>2.077.218.750</b>	<b>100%</b>	<b>Angka melahirkan diusia remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan</b>	<b>2.085.559.900</b>	<b>2.077.218.750</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase kelompok keluarga yang dibina</b>

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	<b>Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	352.440.000	98%	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.644.300.000	1.644.300.000	100%	Jumlah Kader mengunjungi Masyarakat dalam pembinaan Program KKBPK
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	81.259.900	80.478.750	99%	Jumlah orang Duta Remaja Mahasiswa yang terpilih bidang KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional
	<b>Jumlah</b>	<b>11.644.165.082</b>	<b>11.149.264.557</b>	<b>96%</b>	

### C. PENGHARGAAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 memperoleh penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan dari BKKBN Pusat Untuk Bapak Ibu Bupati yaitu MKK (Manggala Karya Kencana) untuk kepala daerah dan Ibu ketua TP PKK



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

2. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Juara I Kategori Role Model Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat



3. Penghargaan Ayah Bunda GenRe Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP PKK



4. Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Juara 2 Duta GenRe Putra Tingkat Provinsi Sumatera Barat



5. Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Pembina GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat



**A. KESIMPULAN**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR) 66,00% dari target 65,89%, dengan kategori Berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran BOKB , dukungan sumber daya manusia (petugas lapangan KB, kader KB ), ketersediaan alat-alat kontrasepsi di faskes, Meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB dan adanya dukungan dari lintas sektoral seperti kegiatan GERAK IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES dan lokakarya mini di kampung KB.
2. Capaian indikator angka melahirkan di usia remaja mencapai 3,18 per1000 dari target yang ditetapkan yaitu 3,9 per1000. dengan nilai skor 118,4 artinya dapat diinterpretasikan kategori sangat berhasil. Ini artinya pemerintah kabupaten padang pariaman dapat menekan angka melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun karena angka yang dicapai dapat lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekal tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dukungan dana BOKB.
3. Capaian indikator presentase Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 1,89 % dari target yang ditetapkan yaitu 2,1%. dengan nilai skor 110% artinya dapat diinterpretasikan kategori berhasil. Ini artinya pemerintah kabupaten padang pariaman dapat menekan Total Fertility Rate karena angka yang dicapai dapat lebih rendah dari target yang ditetapkan.
4. Capaian Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dapat mencapai Nilai A dengan nilai absolut 80,35 %, artinya dapat diinterpretasikan kategori berhasil hal

---

ini disebabkan dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan SAKIP Perangkat Daerah.

## **B. Langkah Kedepan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Meningkatkan Advokasi dan KIE tentang Keluarga Berencana kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
3. Meningkatkan peran kader dilapangan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi ke instansi terkait seperti BKKBN Perwakilan Sumatera Barat.
5. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**Dra.ELFI DELITA,M.Farm,Apt**  
**NIP. 196608021993032005**